

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota


Perolehan PAD Belum Capai Target ► Kurang Rp 5,226 Triliun

Gambir, Warta Kota

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta 2019 menjelang pergantian tahun belum mencapai target. Hingga pertengahan Desember 2019, realisasi PAD dari 13 komponen pajak baru mencapai Rp 39,314 triliun dari target Rp 44,540 triliun atau kurang Rp 5,226 triliun.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menjelaskan, ada empat dari 13 komponen PAD yang realisasinya melebihi target. Di antaranya Pajak Air Tanah (PAT) mencapai 111 persen, Pajak Restoran hingga 101 persen, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 100,5 persen dan Pajak Parkir sebesar 102 persen. "Kami optimis hingga akhir 2019 PAD yang belum memenuhi target bisa mencapai target," kata Faisal pada Selasa (24/12).

Faisal mengimbau kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Apalagi pihak yang mengemplang pajak akan mendapat sank-



**Kami optimis
hingga akhir 2019
PAD yang belum
memenuhi target
bisa mencapai target.**

Faisal Syafruddin
Kepala BPRD
DKI Jakarta

si. Bahkan tidak menutup kemungkinan petugas akan menyita aset.

Karena itu, Faisal meminta kepada masyarakat untuk patuh terhadap aturan. Apalagi DKI telah mengeluarkan kebijakan pemotongan pokok pajak hingga 50 persen sekaligus penghapusan denda.

Agar perolehan pajak pada 2020 mendatang lebih maksimal, BPRD DKI Jakarta

kini menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sinergitas dua lembaga itu telah tertuang dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk peningkatan kepatuhan Pajak Daerah pada tahun 2020 di Kantor Kejati DKI, pada Senin (23/12).

Sementara, Kepala Kejati DKI Jakarta, Warih Sadon, mengatakan penandatanganan ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, sehingga target-target itu terlampaui.

"Dengan MoU ini kami bisa memberikan dukungan-dukungan baik dalam bantuan hukum, tindakan hukum maupun penerimaan hukum. Apabila diterbitkan suara kuasa khusus kami bisa dapat mendampingi BPRD dalam upaya penagihan," kata Warih.

Dengan ada kesepahaman ini untuk upaya penindakan pajak pada tahun 2020. "Jadi secara kerja sama bersama Kejati DKI Jakarta, hubungan secara hukum kami kuat dan 'law infroement' kami kuat," ujarnya. (faf)